

Eko Desak Kejati Usut Pasar Ir Soekarno

SOLO, TRIBUN- Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto, meminta Kejati Jateng segera menindaklanjuti temuan BPK terkait proyek revitalisasi pembangunan pasar Ir Soekarno di Kabupaten Sukoharjo.

Menurutnya laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jateng, bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan penyelidikan. "Hasil audit itu harus menjadi pijakan untuk pelaporan dugaan korupsi," kata Eko, Minggu (2/3).

Dalam LHP yang diserahkan BPK RI kepada

Pemkab Sukoharjo, Jumat kemarin, sudah bisa menjadi petunjuk kuat adanya dugaan korupsi. Dalam LHP disebutkan, pembangunan fisik pasar oleh rekanan mengalami cacat mutu. "Itu jelas ada indikasi kuat korupsi, pengerjaan tidak sesuai spesifikasi," lanjut dia.

KP2KKN berharap ada sinergi antara BPK RI dengan Kejaksaan atau Kepolisian dalam perkara dugaan korupsi. Tidak perlu saling menunggu untuk menyerahkan atau meminta LHP, jika memang ada dugaan korupsi. "Kami akan proaktif menyelidiki dugaan ini, dan selanjutnya melaporkan ke aparat penegak hukum (APH)," ujar dia.

Jangan sampai 8 temuan BPK ini dibiarkan saja. Karena jelas-jelas dinyatakan proyek tersebut terdapat cacat mutu pada item pekerjaan.

Sebelumnya diberitakan, proyek revitalisasi pasar Ir Soekarno di Kabupaten Sukoharjo senilai Rp 27,968 miliar tahun anggaran 2012 masih mangkrak. BPK RI telah mengauditnya dan menyatakan ada 8 temuan. BPK RI perwakilan Jateng telah mengaudit proyek tersebut selama 30 hari, sejak 15 Januari 2014 - 13 Februari 2014. Kepala Perwakilan BPK RI Jateng, Ignasius Bambang Adiputranta menyatakan, pemeriksaan itu juga kerjasama dengan tim

teknis Pusat Studi Ilmu Teknik (PSIT) UGM.

Bambang menegaskan, berdasar hasil pemeriksaan, ada 8 temuan dalam hal itu. Di antaranya, pembangunan pasar tidak didukung anggaran yang memadai. Dokumen penawaran PT Ampuh Sejahtera (AS) tidak sesuai. Dan terdapat cacat mutu pada item pekerjaan, serta kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 4,085 miliar.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidus) Kejati Jateng, Masyhudi, mengaku pihaknya belum mendapat informasi resmi terkait LHP ini. Sehingga belum bisa memberikan penjelasan terkait tindak lanjut atas LHP tersebut. "Kalau ada informasi atau laporan dugaan

STORY HIGHLIGHTS

- BPK serahkan hasil pemeriksaan (28/2)
- Ada 8 temuan di proyek pasar Ir Soekarno
- Beri 9 rekomendasi untuk Bupati Wardoyo
- Volume pekerjaan kurang Rp 4 miliar
- Kejati Jateng belum dapat info resmi LHP
- KP2KKN desak Kejati usut dugaan korupsi

korupsi, pasti kami tindaklanjuti. Kami baru dengar informasi ini dari sampean," kata Masyhudi. (yan)